

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2019). *Penegakan Hukum dalam Perspektif Kebijakan*. Kriminal. Jakarta: Prenada Media.
- Salshabila, Adela. (2023). Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisata Di Destinasi Wisata Air Alam Muncul Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Abidin, Z. (2013). Penanganan Problematika Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) Melalui Bimbingan Dan Konseling Islami Di Balai Rehabilitasi Sosial “Martani” Cilacap. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 7(2).
- Ahmad, M. (2010). Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan-Pengemis (Gepeng). *Jurnal Penelitian*, 7(2).
- Anasiru, R. (2011). Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Makasar. *Jurnal Sosiokonsepsia*, 16(2).
- Ardiansyah, Y. (2018). *Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Data BPS Jateng.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kota Semarang Dalam Angka 2024* (Volume 51). Semarang: BPS Kota Semarang.
- Darmayasa, I. W. E., Dewi, A. A. S. L., & Widyantera, I. M. M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur sebagai Pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 104–109.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial. (2007). *Standar Pelayanan minimal Pelayanan dan Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis*. Jakarta: Kementrian sosial.
- Echols, J. M., & Syadily, H. (1990). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hafid, M. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar). *Jurnal Al Hikmah*, 21(2).
- Hakim, A. (2011). Apa Definisi Ketertiban Umum? Diambil dari hukumonline.com
- Halim, S. Al. (2022). Law Enforcement of Child Exploitation as Street Children in Semarang City during the Pandemic Period. *Journal of Social Science Research and Review*, 5(11), 352–363.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361–378.
- Hanafi. (2022). Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Johnsen, S., Fitzpatrick, S., & Watts, B. (2018). Homelessness And Social Control: A Typology. *Routledge Housing Studies*, 33(7), 1106–1126. <https://doi.org/10.1080/02673037.2017.1421912>
- Kelsen, H. (2016). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Cetakan XI). Yogyakarta: Nusa Media.
- Maemunah, M. (2019). Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep HAM Pasca Reformasi. *Jatiswara*, 34(2), 193–211.
- Masriani, Y. T. (2004). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oppusunggu, Y. U. (2008). Pertemuan Ilmu Hukum dan Sosiologi dalam Penerapan Lembaga Ketertiban Umum. *Law, Society & Development*, II(3), 3.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang.
- Prasasi, C. A., Tyesta, L., & Herawati, R. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 1–15.
- Purwata, I. K. (2019). Efektifitas Berlakunya Hukum Berinvestasi Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Bisnis Pariwisata. *Media Bina Ilmiah*, 13(8), 1415–1432.
- Putro, R. D. (2015). *Pembinaan Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar*

(PGOT) di Balai Rehabilitasi Sosial “Samekto Karti” Pemalang.
Universitas Negeri Semarang;

- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahmawati, A. A., Listyarini, D., & Andraini, F. (2024). Penegakkan Hukum dan Sanksinya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Upaya Perlindungan Hukum pada Anak Jalanan Beserta Hambatannya di Kota Semarang. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 1081–1094. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.6243>
- Ridwan, H. (2011). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohmah, N. N. (2017). *Model Penanganan Bagi Pengemis Gelandangan Dan Orang Terlantar Di Kabupaten Banyumas*. Universitas Negeri Semarang.
- Salman, O., & Susanto, A. F. (2004). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum* (2 Cet–1). Bandung.
- Sasangka, H. (2010). *Praturan Perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia (Susunan dalam Satu Naskah)*. Bandung: Mandar Maju.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi*, 18(2), 1–16.
- Soekanto, Soejono. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2021). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso, S. (2012). *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Suparlan, P. (1993). *Orang Gelandangan Di Jakarta: Politik Pada Golongan Termiskin Dalam Kemiskinan Di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Syahza, A., Bakce, D., Nasrul, B., & Mustofa, R. (2020). Utilization Of Peatlands Based On Local Wisdom And Community Welfare In Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 15(7), 1119–1126. <https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ijstdp.150716>

- Utami, N. P. M. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wahab, S. (1997). *Analisis Kebijakan dan Formulasi Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijayanti, D. P. (2022). Penanggulangan pengemis , gelandangan , orang terlantar dan anak jalanan bagian dari upaya Satpol PP Kabupaten Klaten. *Jurnal Kajian Mahasiswa PPK*, 11(04), 421–436.